



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 23 September 2020

Halaman: 8

Sultan: Masyarakat Harus Punya Kesadaran

Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota se-DIY untuk konsisten menerapkan sanksi.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Kesadaran masyarakat di DIY, khususnya di Kota Yogyakarta, dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 masih rendah. Buktinya, sudah ratusan warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker.

"Dalam konteks untuk menjaga kesehatan didasari kesadaran pada dirinya sendiri. Dari prinsip itu dirinya (masyarakat) harus punya kesadaran bahwa melaksanakan protokol kesehatan tidak mempersulit dirinya. Tapi untuk keselamatan dirinya dan orang lain," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Shelter Tegalrejo atau Rusunawa Bener, Yogyakarta, Selasa (22/9).

Ratusan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tersebut didapatkan dari operasi yang digelar Satpol PP Kota Yogyakarta sejak 19 September 2020 lalu. Masyarakat yang terjaring operasi pun dikenakan sanksi sosial dan ke depannya akan didenda sebesar Rp 100 ribu.

Gubernur pun meminta pemerintah kabupaten/kota se-DIY untuk konsisten menerapkan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan

pencegahan Covid-19. Hal ini ia sebutkan usai banyaknya warga yang kedapatan tidak menjalankan protokol kesehatan. Salah satunya di Kota Yogyakarta, terutama di tempat publik dan kawasan wisata seperti Malioboro dan Tugu.

Setidaknya sudah ratusan masyarakat yang dikenakan sanksi sosial akibat tidak menjalankan protokol kesehatan, terutama tidak menggunakan masker. "Kota (Yogyakarta) saya kira juga menerapkan sanksi. Ya sudah, diterapkan sanksi secara konsisten saja karena itu memungkinkan. Karena yang punya rakyat itu kabupaten/kota, bukan provinsi. Provinsi itu hanya koordinator dengan otonomi daerah," kata Sultan.

Sultan juga meminta kabupaten/kota di DIY untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Hal ini mengingat kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 masih terus menunjukkan tren yang meningkat.

"Saya berharap kita semua jangan segan-segan untuk ikut mendisiplinkan masyarakat. Gerakan secara konsisten dan tidak segan-segan untuk memperingatkan, karena kesadaran itu memang mahal," ujarnya.

Identifikasi terkait kawasan yang banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, kata Sultan, juga penting dilakukan. Sebab, ada kemungkinan pelanggaran protokol kesehatan ini bukan warga DIY. "Itu bagi saya jadi sangat penting. Kawasan Malioboro akan berbeda dengan kawasan lain yang sifatnya lokal. Kalau Malioboro ditemukan (pelanggaran protokol), itu belum tentu yang masuk itu semua orang DIY. Dalam arti ada kemungkinan orang dari luar DIY itu juga masuk," jelasnya.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto sebelumnya mengatakan, operasi dalam upaya penegakan protokol kesehatan ini dilakukan sesuai dengan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka Pengendalian Kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta. Terlebih, kasus baru positif Covid-19 di Kota Yogyakarta melonjak sejak Agustus 2020.

Operasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai sejak 19 September hingga akhir September. Pada tahap pertama ini akan difokuskan di kawasan Tugu, Malioboro, dan Keraton. Tiga kawasan tersebut menjadi perhatian besar dikarenakan menjadi pusat keramaian dan rentan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di kawasan tersebut.

Sementara, tahap kedua akan dilakukan pada awal Oktober hingga Desember mendatang. "Pelanggaran diberikan sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas umum, meny-

nyikan lagu Indonesia Raya, melafalkan Pancasila, dan *push up*. Khusus bagi yang tidak mengenakan masker dan telah mendapatkan sanksi sosial, jika tidak memberikan efek jera akan didenda Rp 100 ribu," ujarnya.

Tidak hanya memberlakukan sanksi pada masyarakat, pelaku usaha juga akan disanksi jika melanggar protokol kesehatan. Sanksi yang diberlakukan pada pelaku usaha dapat berupa pencabutan izin usaha dan penutupan paksa.

Kemarin, Pemkot Yogyakarta menyatakan tengah mencari beberapa *shelter* sebagai tempat penampungan bagi tenaga kesehatan. Terutama tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di Kota Yogyakarta.

"Kami sudah menjajaki adanya beberapa *shelter* lagi yang mungkin kita akan buat untuk penanganan Covid-19. (Seperti) *shelter* di Umbulharjo, Nitikan dan sebagainya untuk tenaga kesehatan dan seterusnya," kata Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

Rusunawa Bener sudah dijadikan sebagai *shelter* yang khusus menangani kasus Covid-19 yang tidak bergejala atau orang tanpa gejala (OTG). *Shelter* ini sudah difungsikan pada 21 September kemarin 2020. "Kami menyebut (Rusunawa Bener) sebagai Shelter Tegalrejo," ujarnya.

Shelter ini dapat menampung 84 OTG. Namun, tidak semua OTG yang akan ditampung di *shelter* ini.

■ ed: Irfan Rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005